



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARYATMI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **238586**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 74.374.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 25.420.000
2. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.420.000
3. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 23.534.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 73.750.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
3. MOTOR, HONDA A1FO2N36M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 68.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.059.051.624****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.275.675.624****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.275.675.624**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.